

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Yudian Wahyudi tentang negara dalam perspektif Al-Qur'an menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dan prinsip maqasid al-syari'ah dalam memahami relasi agama dan negara. Yudian Wahyudi menolak konsep khilafah sebagai sistem politik wajib bagi umat Islam dan lebih mengutamakan penerapan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, penguasaan ilmu pengetahuan, dan pengelolaan keberagaman. Baginya, negara ideal adalah entitas dinamis yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan sistem pemerintahan modern, termasuk demokrasi, selama prinsip-prinsip Islam yang esensial tetap terjaga. Pemikiran ini menawarkan alternatif moderat dalam wacana politik Islam kontemporer, yang relevan bagi konteks negara bangsa modern seperti Indonesia.

Pengaruh historis dan budaya memiliki peran penting dalam membentuk konsep negara menurut Yudian Wahyudi. Ia menegaskan bahwa sejarah panjang Nusantara, mulai dari era kerajaan hingga kemerdekaan, telah menciptakan fondasi kebangsaan yang kaya dan beragam. Pancasila, bagi Yudian Wahyudi, adalah hasil ijtihad politik para pendiri bangsa yang mencerminkan prinsip-prinsip universal Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan kebebasan beragama. Dengan pendekatan maqasid al-shariah, Yudian Wahyudi melihat Pancasila sebagai kontrak sosial (*Darul Mitsaq*) dan konsensus nasional (*Darul Ijmak*) yang bukan hanya selaras dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga mampu menjadi wadah bagi keberagaman bangsa. Pemikirannya menegaskan pentingnya memahami negara sebagai

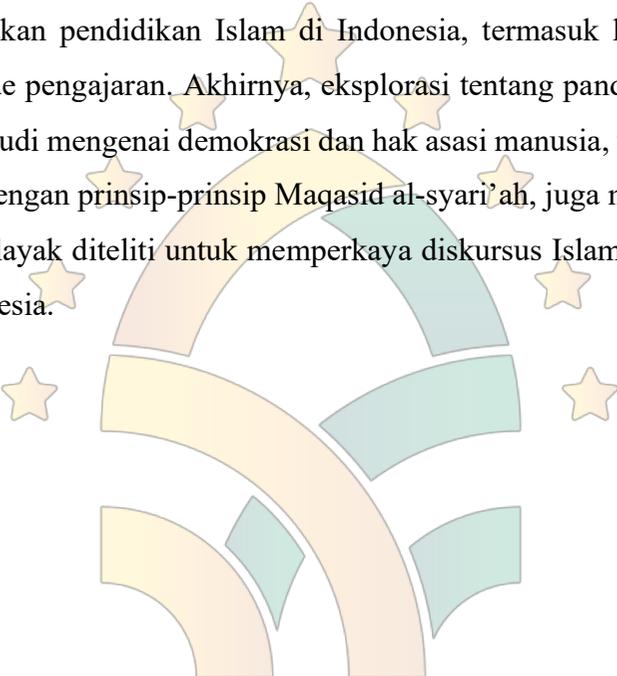
entitas budaya dan spiritual yang terus berkembang sesuai konteks zaman.

Pemikiran Yudian Wahyudi memberikan fondasi teoretis dan praktis bagi relasi agama dan negara di Indonesia. Melalui pendekatan maqasid al-syari'ah, Yudian Wahyudi berhasil menunjukkan bahwa Pancasila bukanlah sekadar konsensus politik, tetapi sebuah *ijtihad* kebangsaan yang selaras dengan nilai-nilai keislaman. Pancasila, dalam pandangannya, adalah *Darul Ahdi was Syahadah* (Negara Perjanjian dan Kesaksian) yang mampu menjadi ruang dialog antaragama tanpa kehilangan identitas keagamaan. Dengan demikian, pemikiran Yudian Wahyudi mengukuhkan bahwa agama dan negara dapat bersinergi untuk membangun keadilan sosial dan ketertiban bersama, menjadikan Indonesia sebagai model harmoni antara tradisi religius dan modernitas.

## B. Saran

Meskipun penelitian ini telah menguraikan secara komprehensif pemikiran Yudian Wahyudi tentang negara dalam perspektif Al-Qur'an dan maqasid al-syari'ah, terdapat beberapa wilayah yang belum sepenuhnya dikaji dan dapat menjadi perhatian dalam penelitian selanjutnya. Salah satunya adalah eksplorasi lebih dalam terhadap konsep *Darul Ijmak* dan *Darul Ahdi was Syahadah* yang diusung Yudian Wahyudi sebagai paradigma relasi agama dan negara. Penelitian lanjutan juga dapat memperkaya analisis dengan melakukan komparasi pemikiran Yudian Wahyudi dengan pemikir Islam kontemporer lainnya, baik dari Indonesia maupun mancanegara, untuk melihat keunikan dan kontribusi pemikirannya dalam wacana politik Islam. Selain itu, studi empiris tentang

pemahaman masyarakat, khususnya kalangan santri, akademisi, dan birokrat, terhadap gagasan Yudian Wahyudi dapat memberikan perspektif baru tentang relevansi pemikirannya dalam konteks Indonesia modern. Pada aspek pendidikan, penelitian lebih lanjut dapat mengkaji bagaimana pemikiran Yudian mempengaruhi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, termasuk kurikulum dan metode pengajaran. Akhirnya, eksplorasi tentang pandangan Yudian Wahyudi mengenai demokrasi dan hak asasi manusia, yang berkaitan erat dengan prinsip-prinsip Maqasid al-syari'ah, juga menjadi bidang yang layak diteliti untuk memperkaya diskursus Islam dan politik di Indonesia.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON